

JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4206.32/Sosiologi Pembangunan 32**
Tugas : **2**

Pertanyaan 1/3:

Jelaskan definisi sistem ekonomi dunia menurut Wallerstein dengan menggunakan bahasa Anda sendiri!

Jawaban 1/3:

Immanuel Wallerstein [1930 -2019] adalah sosiolog Amerika yang mengembangkan teori sistem (ekonomi) dunia atau *the world system theory* (Ref. [2], Wallerstein (1974, 1079, 2004)). Secara sederhana, dalam teori ini, sistem ekonomi dunia dianggap berfungsi sebagai satu sistem yang ter-inter-koneksi walau pun terbagi-bagi dalam sekitar 200 negara. Perekonomian di suatu negara, menurut **Wallerstein**, tidak bisa dilihat sebagai suatu sistem yang ter-isolasi atau terpisah sendiri-sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem kapitalisme global yang mulai terbentuk sejak abad ke 16 di Eropa (atau tepatnya: dari Eropa), yaitu sejak berkembangnya imperialisme dan kolonialisme. Sistem kapitalisme global ini membuat sebagian kecil negara menjadi dominan dan kaya-raja (yaitu negara-negara inti, atau *core countries*) dan sebagian besar lainnya menjadi miskin, bergantung dan ter-eksploitasi (yaitu negara-negara pinggiran, atau *peripheral countries*). Negara-negara inti adalah negara-negara dengan ciri-ciri negara yang maju perekonomian dan industrinya, dominan dalam kemajuan teknologi dan mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan bebas dunia. Negara-negara inti ini menghasilkan produk-produk bernilai tinggi, lembaga-lembaga negaranya kokoh, menguasai sistem keuangan domestik dan internasional, dan kuat posisinya dalam percaturan geopolitik global. Negara-negara pinggiran sebaliknya, umumnya menjadi peng-ekspor material hasil sumber daya alam mentah, dan peng-impor barang jadi. Misalnya, negara-negara pinggiran meng-ekspor biji coklat ke negara-negara inti yang tidak memiliki kebun coklat, tapi meng-impor permen coklat dan coklat bubuk dari negara-negara tersebut, karena negara-negara pinggiran tidak menguasai teknologi industri pengolahan coklat. Minyak mentah, bauxit, nikel, dan masih banyak lagi hasil sumber daya alam, di-ekspor oleh negara-negara pinggiran ke negara-negara inti, kemudian negara-negara pinggiran meng-impor kembali dari negara inti bahan bakar minyak, alumunium, baja dan lain-lain, karena negara-negara pinggiran kekurangan kilang minyak dan *smelter* hasil tambang di negaranya masing-masing, serta tergantung teknologinya kepada negara-negara inti. Contoh negara-negara inti misalnya: Amerika Serikat, Cina, Jerman, Jepang, sedangkan contoh negara-negara pinggiran adalah negara-negara di

benua Afrika, Asia dan Amerika Latin, mantan jajahan negara-negara inti pada masa lampau. Ringkasnya, **Wallerstein** memandang sistem ekonomi dunia sebagai sistem kapitalisme global yang “tidak adil” (*unequal*) karena misalnya untuk pekerjaan yang sama, perbedaan pendapatan di negara-negara inti, negara-negara pertengahan dan negara-negara pinggiran, bedanya sangat signifikan.

Pertanyaan 2/3:

Bagaimana posisi Indonesia dalam konstelasi ekonomi global saat ini? Jelaskan dengan menyertakan contoh konkret!

Jawaban 2/3:

Indonesia, bersama-sama dengan Brazil, India dan Turki, misalnya, jelas tidak termasuk negara-negara inti menurut teori sistem dunia, tapi tidak bisa juga di-kategori-kan sebagai negara-negara pinggiran. Karena itu, negara-negara ini biasa di-kategori-kan sebagai negara *semi-peripheral*, yang posisinya berada di pertengahan antara negara pinggiran – *peripheral countries* - dengan negara inti - *core countries* -, atau termasuk asal-mulanya adalah negara pinggiran yang sedang maju menuju ke posisi negara inti. Karakteristik dari negara-negara pertengahan (antara negara inti dan negara pinggiran) ini antara lain: sebagian wilayah dan penduduknya sudah memasuki era industri, sementara sebagian lainnya belum, sebagian dari negara ini ber-perilaku eksploitatif terhadap sebagian yang lain, dan - dalam konstelasi sistem ekonomi dan perdagangan dunia – negara-negara pertengahan ini menjadi “penyangga” (*buffer*) di antara negara-negara inti dan negara-negara pinggiran. **Wallerstein** sendiri menganggap keberadaan negara-negara pertengahan ini sebagai penjaga kestabilan dan keseimbangan ekonomi dunia.

Salah satu contoh yang mem-posisi-kan Indonesia sebagai negara pertengahan, adalah Indonesia masih meng-ekspor bahan mentah hasil ekstraksi sumber daya alam seperti negara-negara pinggiran, tapi sudah berhasil juga membangun industri manufaktur-nya seperti di negara-negara inti. Contoh yang lain terkait upah pekerja yang di sebagian wilayah Indonesia masih tergolong rendah seperti di negara-negara pinggiran, tapi di sebagian yang lain sudah mulai lebih tinggi, seperti di negara-negara inti. Tapi tentu saja posisi Indonesia dalam konstelasi global sebagai negara pertengahan menurut pandangan Wallerstein, bukanlah satu-satunya *positioning* yang ada. Selain itu posisi merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. Korea Selatan sebagai contoh, bergerak cepat dari posisi pertengahan seperti Indonesia menuju ke posisi negara inti seperti Jepang dan Jerman.

Para pendukung teori ketergantungan (Ref. [2], Dos Santos ((1970), Frank (1967)) seperti ekonom Brasil **Theotonio Dos Santos** [1936 – 2018] dan sejarawan ekonomi dan sosiolog Jerman **Andre Gunder Frank** [1929 - 2005], menganggap Indonesia masih belum beranjak dari posisi

sebagai negara pinggiran karena: (1) meng-ekspor bahan mentah, seperti batubara, minyak sawit, nikel, gas alam), (2) bergantung pada pinjaman luar negeri dan modal asing, (3) impor teknologi, belum mampu mengembangkan sendiri dan (4) belum mampu menetapkan harga komoditas sendiri, tergantung harga komoditas internasional. Pertumbuhan ekonomi negara-negara seperti Indonesia menurut Dos Santos dan Frank, bergantung pada harga komoditas internasional. Ketika harga komoditas naik, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sebaliknya ketika anjlok, pertumbuhan ekonomi pun melambat.

Selain teori ketergantungan dan teori sistem ekonomi dunia, masih banyak teori-teori lain yang mem-posisi-kan Indonesia dalam konstelasi ekonomi global. Di antaranya misalnya perspektif era teknologi digital yang mem-posisi-kan Indonesia sebagai pasar yang berkembang pesat – walau pun infrastrukturnya masih sangat bergantung teknologi dan modal asing – atau perspektif geopolitik yang mem-posisi-kan Indonesia sebagai “penyeimbang” karena letak wilayahnya yang strategis, kekayaan sumber daya alam-nya dan pengaruhnya yang besar di antara negara-negara ASEAN.

Posisi Indonesia dalam konstelasi ekonomi global berbeda-beda tergantung teori dan perspektif yang digunakan karena beberapa sebab, misalnya: (1) keragaman kondisi berbagai wilayah di Indonesia (antara perkotaan dan pedesaan, antara pulau Jawa dan luar Jawa, antara kawasan barat dan timur, dan lain-lain), (2) industrialisasi yang semakin meng-global, tidak bisa dibatasi pada satu atau dua negara saja, dan (3) juga adanya kekuatan sektor ekonomi informal yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika terjadi krisis ekonomi. Contoh kongkrit dari globalisasi industri, misalnya terkait industri elektronika konsumen (*consumer electronics*), yang produknya dikirim bolak-balik dari mulai perakitan sampai *testing*, pengemasan dan pemasaran antara Batam dan Singapura sebagai proses ekspor-impor, sehingga sulit ditentukan apakah barang-barang itu sebenarnya “*made in Indonesia*” atau “*made in Singapore*”.

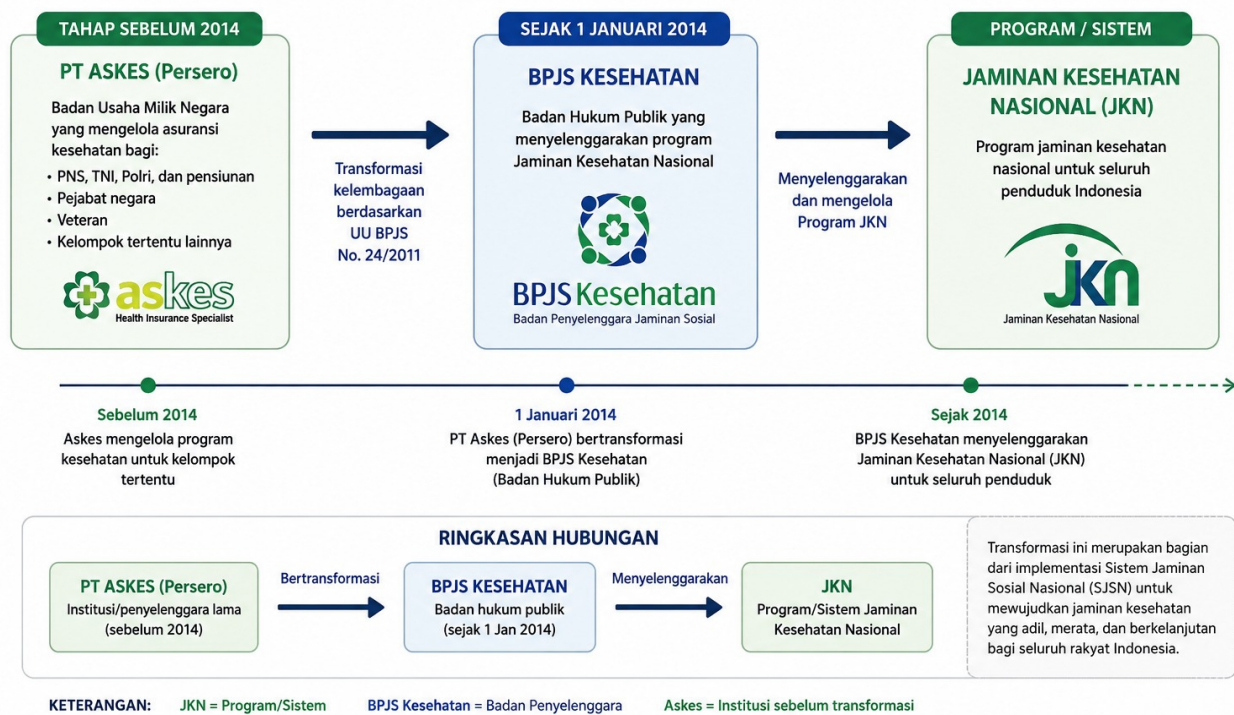
Pertanyaan 3/3:

Pilih satu contoh pembangunan di Indonesia (bukan hanya infrastruktur, misalnya: pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan). Jelaskan dan berikan analisis kritis terhadap dampak sosial dari pembangunan tersebut!

Jawaban 3/3:

Salah satu contoh pembangunan non-infrastruktur yang dipilih adalah pembangunan Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Gagasan besarnya adalah dalam rangka membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kelak berfungsi sebagai jejaring pengaman sosial (*Social Security Network*) bagi seluruh rakyat Indonesia (Ref. [5]). Asal muasalnya adalah asuransi kesehatan yang dikelola oleh BUMN asuransi yaitu PT. ASKES

(Persero). PT. ASKES (Persero) menyediakan asuransi kesehatan untuk aparat sipil negara (ASN d/h PNS), pegawai BUMN. TNI, Polri, pensiunan, dan kelompok-kelompok lain. Mulai tahun 2014, sesuai undang-undang yang berlaku, PT. ASKES (Persero) di-integrasi-kan menjadi badan hukum publik yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersama-sama dengan BUMN lain yang mengelola asuransi ke-tenaga-kerjaan. Dengan demikian ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ke-Tenaga-Kerja-an.



Gambar 1
Perkembangan dari Asuransi Kesehatan ke BPJS Kesehatan dampai ke JKN

Pengembangan sistem JKN dari BPJS Kesehatan adalah suatu pembangunan non-fisik yang dianggap salah satu yang paling ambisius karena skala yang ingin dicapai adalah jaminan asuransi kesehatan untuk seluruh warga negara Indonesia, minimal setiap kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga diharapkan memiliki satu akun peserta BPJS Kesehatan. Dari perspektif sosiologi pembangunan, BPJS Kesehatan adalah suatu bentuk modernisasi lembaga pelayanan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan tanggung-jawab negara dalam menjaga kesehatan warganya dan upaya untuk mempersempit kesenjangan dan tidak meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan telah memperluas dengan cepat akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, mengurangi pembiayaan tindakan medis yang seringkali tidak terbayangkan oleh sebagian warga masyarakat. Seorang teman yang menjalani operasi *by-pass* jantung di RS Harapan Kita pekan lalu tanpa BPJS, harus mengeluarkan biaya sampai Rp. 400 juta, sementara teman lainnya yang menjalani operasi yang sama di tempat yang sama, tapi

menggunakan BPJS, hampir tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Perbedaanannya, teman yang tidak menggunakan BPJS bisa langsung dijadwalkan untuk operasi dalam beberapa hari setelah ditetapkan oleh dokternya untuk operasi, sedangkan teman yang menggunakan BPJS harus menunggu giliran sampai beberapa bulan karena antrian yang panjang. Salah satu kritik dari pengguna BPJS adalah masalah antrian yang tidak menentu, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, tergantung banyak atau sedikitnya pasien pada satu periode yang sama. Mungkin nanti jika sudah menerapkan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*, AI) dalam mengatur berbagai antrian, yaitu antrian di klinik fasilitas kesehatan tingkat pertama, antrian di poliklinik fasilitas kesehatan lanjutan, antrian di apotik, antrian untuk mendapatkan layanan khusus, serta antrian untuk mendapatkan kamar perawatan, pelayanannya akan terasa lebih nyaman bagi pasien. Birokrasi pelayanan BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir sudah jauh lebih baik dibandingkan birokrasi ketika masih dikelola oleh PT. ASKES (Persero) dahulu.

Beberapa pihak mengeluhkan subsidi yang membengkak dalam pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan, sementara pihak penyedia jasa – rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan, apotik dan industri farmasi – masih mengeluhkan rendahnya pembiayaan dari BPJS serta rumitnya birokrasi dalam urusan hutang-piutang dengan BPJS Kesehatan. Digitalisasi sistem pelayanan BPJS banyak yang memuji, tapi juga masih mendapatkan kritik terkait dengan keamanan data kesehatan pasien dan kesulitan yang dialami oleh pasien yang “gaptek” karena tidak menguasai teknologi digital untuk mengakses layanan BPJS Kesehatan. Juga masih dirasakan disparitas pelayanan antara peserta BPJS Kesehatan dari berbagai kelas pelayanan, serta pasien non-BPJS, baik yang menggunakan asuransi kesehatan lain, mau pun yang tidak memiliki asuransi.

REFERENSI

- [1] **Musta'in Mashud, Sutinah dan Sudarso**, “*Sosiologi Pembangunan*”, **Modul 1 – 9, SOSI4411**, Edisi 2, [November 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Sistem Ekonomi Dunia**:
- Frank, A.G. [1967], “*Capitalism and Underdevelopment in Latin America*”. Monthly Review Press.
- Dos Santos, T. [1970], “*The Structure of Dependence*”, *The American Economic Review*, 60(2), 231–236
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press.
- Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.
- Wallerstein, I. (1979). *The capitalist world-economy*. Cambridge University Press.
- Chase-Dunn, C., & Grimes, P. (1995). World-systems analysis. *Annual Review of Sociology*, 21, 387–417.

Shannon, T. R. (1996). *An introduction to the world-system perspective* (2nd ed.). Westview Press.

[3] Posisi Indonesia dalam Konstelasi Sistem Ekonomi Dunia:

Hill, H. (2000). *The Indonesian economy* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*. Macmillan Press.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Allen & Unwin.

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Winters, J. A. (1996). *Power in motion: Capital mobility and the Indonesian state*. Cornell University Press

[4] Laporan Lembaga Internasional:

World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects*. World Bank Group.

Asian Development Bank. (2024). *Asian development outlook 2024: Indonesia*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *OECD economic surveys: Indonesia 2021*. OECD Publishing.

[5] Asuransi Kesehatan BPJS:

Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., ... Thabrany, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75–102.

Thabrany, H. (2014). *Jaminan kesehatan nasional*. Rajawali Pers.

Pisani, E., Kok, M. O., & Nugroho, K. (2017). Indonesia's road to universal health coverage: A political journey. *Health Policy and Planning*, 32(2), 267–276.

Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). *The Republic of Indonesia health system review*. World Health Organization.